

Peran Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam Pelaksanaan Diplomasi Kemanusiaan Indonesia

Mauludina Fernanda Putri Gusman

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: mauludina.fernanda.2014@fisipol.umy.ac.id

Abstract

This paper aims to analyze the role of Aksi Cepat Tanggap (ACT) as a new track of diplomacy in responding to global humanitarian issues which turns out to influence the humanitarian diplomacy of Indonesia. According to multi-track diplomacy concept, ACT has roles as an alternative track and a complement in responding to global humanitarian issues by the involvement of their professionals and activists. Also, all of their activities could eventually influence and inspire the Indonesian government to run further in responding to the global humanitarian issues.

Keywords: Aksi Cepat Tanggap, Indonesia, Global Humanitarian Issues, Humanitarian Diplomacy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai sebuah jalur diplomasi baru dalam menangani isu kemanusiaan internasional yang ternyata dapat memengaruhi diplomasi kemanusiaan Indonesia. ACT mampu berperan sebagai jalur alternatif dan pelengkap dalam menangani isu kemanusiaan global melalui keterlibatan para profesional dan aktivis di dalamnya berdasarkan konsep diplomasi multi jalur. Berbagai aksi ACT pada akhirnya juga mampu memengaruhi dan menginspirasi pemerintah Indonesia untuk bergerak lebih jauh dalam menangani isu kemanusiaan global.

Kata Kunci: Aksi Cepat Tanggap, Indonesia, Isu Kemanusiaan Internasional, Diplomasi Kemanusiaan

Pendahuluan

Saat ini, isu kemanusiaan telah menjadi perhatian besar masyarakat internasional. Mulai dari bencana alam dengan dampak yang berkepanjangan, konflik internal dalam negeri yang semakin membesar dan memburuk hingga menciptakan dampak yang masif, krisis kelaparan yang kebanyakan berujung pada gizi buruk dan mengancam nyawa, hingga genosida atau pembantaian etnis secara besar-besaran. Segala permasalahan tersebut telah banyak terjadi pada abad ke 21 ini dan hampir keseluruhannya merupakan krisis kemanusiaan.

Permasalahan kemanusiaan di dunia saat ini belum dapat dikatakan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan beberapa berita yang dirilis oleh media internasional dan PBB bahkan menyatakan bahwa tahun 2018 merupakan tahun dimana krisis kemanusiaan semakin memburuk, seperti krisis yang terjadi di Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Libya, Mali, Republik Kongo, Somalia, Sudan Selatan, Venezuela, Ethiopia, Irak, Nigeria, Palestina, Sudan dan Suriah.

Berbagai aktor pmulai bermunculan dalam merespon isu tersebut, dari level negara hingga individu. Aksi Cepat Tanggap (ACT) merupakan salah satu yang aktif dalam merespon krisis kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan di dunia internasional. ACT sendiri dilahirkan karena adanya krisis kemanusiaan yang terjadi baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Dimulai dari bencana tsunami Aceh tahun 2004 yang menjadi awal mula kelahiran ACT. kemudian melihat krisis yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja ACT mulai bergerak ke cakupan yang lebih luas hingga bertransformasi mejadi lembaga kemanusiaan global di tahun 2012. Awal mula pergerakan ACT di dunia internasional sendiri dimulai sejak tahun 2006 dengan program Food for Palestine. Hingga saat ini ACT sendiri sudah bergerak ke lebih dari 47 negara di dunia.

Kehadiran ACT sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam negeri dan juga dunia internasional. ACT sebenarnya merupakan sebuah bentuk adanya dukungan dari *civil society* terhadap bencana di dalam negeri. Peran *civil society* sangatlah diperlukan dalam keadaan emergensi, karena pemerintah

tidak akan sanggup menanganinya sendirian. Kurang sigapnya pemerintah dalam menangani isu kemanusiaan seperti bencana alam, membuat organisasi kemanusiaan bergerak satu langkah didepan pemerintah. Sangat mungkin hal ini terkait dengan hirarki birokrasi yang panjang dan berliku hingga menghambat percepatan dalam peimplementasian.

Sedangkan faktor internasional yang memengaruhi ACT sendiri ialah ketika ACT melihat para relawan dari luar negeri hadir pada tsunami Aceh untuk membantu dan menunjukkan bahwa territorial bukanlah suatu masalah yang membatasi aksi kemanusiaan. Selain itu, peran dari sisi *stakeholder*, aktor-aktor utama dalam hubungan internasional seperti negara, PBB dan berbagai organisasi internasional lain dirasa belum sepenuhnya optimal dalam menanggulangi permasalahan kemanusiaan.

Indonesia dan Diplomasi Kemanusiaan

Sejak pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintah ternyata sudah mulai melakukan diplomasi kemanusiaan secara global. Hal ini terkait dengan mandat konstitusi yaitu pada Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, termaktub kalimat “...*dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*” yang artinya bahwa, Indonesia didirikan dengan tujuan agar hak asasi manusia dijunjung tinggi, sehingga segala permasalahan yang meresahkan manusia dalam bentuk apapun harus dihapuskan, demi mewujudkan dunia serta masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.

Dalam selang satu tahun setelah kemerdekaan, Indonesia menyumbangkan bantuan beras sebanyak 500.000 ton kepada rakyat India yang ketika itu mengalami bencana kelaparan. Peristiwa tersebut kemudian dikenal juga sebagai diplomasi beras yang dilakukan oleh Perdana Menteri Indonesia pertama yaitu Sutan Sjahrir.¹

Sejak tahun 1956, Indonesia juga telah mulai melakukan pengiriman pasukan perdamaian yang dinamakan Kontingen Garuda (KONGA) dalam misi penjaga perdamaian PBB. Hingga saat ini Indonesia telah mengirimkan sebanyak

¹ Ari Rahmad Hidayat, “Bantuan Beras ke India Tahun 1946”, *Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah* Volume 1 No.2, Mei 2013, hlm. 79

2.843 personel di berbagai misi perdamaian. Bahkan, Indonesia berada dalam peringkat 10 besar negara yang menyumbangkan pasukan perdamaian PBB terbanyak.

Dalam memerjuangkan kemerdekaan Palestina, Indonesia juga memiliki peran yang sangat besar, seperti ketika Indonesia menjadi tuan rumah *Asian Games* tahun 1962. Saat itu Indonesia bersikeras menolak keikutsertaan kontingen Israel pada olimpiade tersebut, hingga Komite Olimpiade Internasional (KOI) kemudian mencabut keanggotaan Indonesia sebagai konsekuensinya.²

Diplomasi kemanusiaan Indonesia pada pemerintahan Presiden Soeharto juga masih terus berlanjut. Seperti saat Vietnam sedang dalam masa pergolakan politik yang kemudian berdampak pada penyebaran pengungsi ke negara-negara tetangga, termasuk ke Indonesia. Akhirnya, pemerintah Indonesia memberikan bantuan untuk para pengungsi yaitu berupa

² Luqman Rimadi, "Sukarno, Cerita Anti-Israel dan Perjuangan Kemerdekaan Palestina", Liputan6, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3189190/sukarno-cerita-anti-israel-dan-perjuangan-kemerdekaan-palestina>, pada 6 Agustus 2018

tempat penampungan transit di Pulau Galang, Kepulauan Riau dengan melakukan kerja sama dengan UNHCR.³ Salah satu tujuan pemerintah menyediakan tempat penampungan menurut Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Mochtar Kusumaatmadja, adalah untuk mengembalikan reputasi Indonesia di mata internasional khususnya di bidang kemanusiaan. Indonesia sendiri sebelumnya sempat dipandang negatif oleh masyarakat internasional, terutama oleh lembaga kemanusiaan *Amnesty International* dikarenakan adanya tuduhan pelanggaran HAM di wilayah Timor Timur.⁴

Dalam konflik Filipina dan *Moro National Liberation Front* (MNLF), Indonesia diminta untuk menjadi mediator resmi di tahun 1993 hingga akhirnya dicapai penandatanganan damai pada tanggal 2 September 1996.⁵

Diplomasi beras yang dilakukan oleh Perdana Menteri Suhtan Sjahrir

³ *United Nations High Commissioner for Refugees*

⁴ Ryan Prasetia Budiman, "Kebijakan Indonesia Terhadap Pengungsi Vietnam di Pulau Galang 1979-1996", Skripsi, Universitas Indonesia, 2012

⁵ M. Syaprin Zahidi, "Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan", *Insignia Journal of Internasional Relations*, Vol 2, No 1, April 2015, hlm. 82

merupakan tonggak kelahiran diplomasi kemanusiaan oleh pemerintah Indonesia. Politik luar negeri era Soekarno yang pada saat itu sebenarnya berfokus pada non-imperialisme, secara tidak langsung juga berisikan misi kemanusiaan didalamnya. Begitu juga pada era pemerintahan Soeharto, meskipun sebenarnya saat itu pemerintah menyatakan bahwa Indonesia tidak menerima pengungsi manapun, karena Indonesia memang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Namun pada akhirnya, pengungsi tetap berdatangan dan bahkan pemerintah menyediakan penampungan sementara karena alasan kemanusiaan.⁶

Pada era reformasi, diplomasi kemanusiaan menjadi lebih aktif dilakukan oleh pemerintah Indonesia, seperti dengan meningkatkan kemitraan dengan negara-negara lain yang memiliki pandangan yang sama atau "*Partnership with Like Minded Countries*" demi menciptakan dunia yang lebih damai dan stabil. Di tahun 2017, pemerintah juga memprioritaskan politik luar negerinya pada isu kemanusiaan seperti isu etnis Rohingya di Myanmar. Bahkan hingga pada tahun 2018, diplomasi perdamaian dan kemanusiaan

dijadikan sebagai salah satu fokus politik luar negeri Indonesia.

Meningkatnya citra sebuah negara dapat diraih ketika dalam isu bencana sebuah negara menjadi negara donor. Adanya pengakuan dunia terhadap negara-negara yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam penanggulangan bencana akan memperbaiki posisi tawarnya dalam memengaruhi negara lain. Dalam kondisi ini, isu bencana berpeluang menjadi *nation branding* atau *image building* yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan politik luar negeri dan diplomasi.⁷

Indonesia sendiri telah berkembang menjadi negara yang tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi telah bertransformasi menjadi negara pemberi bantuan. Tercatat sejak tahun 2006 hingga Mei 2014, Indonesia telah memberikan bantuan sebanyak 71 program bantuan di berbagai bidang. Kemudian ketika pada tahun 2007, Indonesia mulai disebut sebagai negara berpenghasilan menengah dan bukan lagi negara berkembang, yang artinya Indonesia harus dapat

⁶ Ryan Prasetya Budiman, op.cit.

⁷ Anita Afriani Sinulingga, "*Isu Bencana dan Prinsip-Prinsip Humanitarian dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional*". *Andalas Journal of International Studies* Vol. 5, No. 1, Mei 2016, hlm. 21

meningkatkan tanggung jawabnya, salah satunya dengan menjadi negara donor. Walaupun Indonesia belum dapat disandingkan dengan negara-negara donor dari barat, karena Indonesia masih memiliki peran ganda.

Keaktifan Indonesia dalam berkontribusi memberikan bantuan, khususnya untuk bantuan kemanusiaan secara global mulai terlihat sejak tahun 2010, baik secara bilateral maupun melalui keanggotannya dalam ASEAN. Beberapa negara yang pernah tercatat sebagai penerima bantuan oleh Indonesia diantaranya adalah Chili, Pakistan, Turki, Myanmar, Vietnam, Laos, Filipina, Thailand, Haiti, Kamboja, Jepang, Australia, Korea Utara, Vanuatu, Palestina, Suriah, serta negara-negara yang terbilang cukup berisiko seperti Myanmar dan juga Somalia. Tentunya tidak berhenti sampai di negara-negara tersebut saja, namun akan terus berlanjut seiring bermunculannya berbagai permasalahan di dunia internasional.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juru bicara beliau, Teuku Faizasyah, menjabarkan tiga hal yang menjadi aktivitas Indonesia dalam diplomasi

kemanusiaan. Pertama, pengiriman pasukan perdamaian KONGA yang mendapat apresiasi luar biasa dari PBB. Pemerintah bahkan membangun *Indonesian Peace and Security Center* di kawasan Sentul sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pasukan perdamaian yang diresmikan oleh Presiden SBY di tahun 2011.⁸ Kedua, resolusi konflik, sejak menjadi mediator dalam konflik Filipina Selatan, kesuksesan tersebut dilanjutkan lagi pada konflik Thailand Selatan. Konflik tersebut telah terjadi selama kurang lebih 100 tahun dan akhirnya pada tanggal 21 September 2008 diakhiri dengan jalan diplomasi kemanusiaan oleh pemerintah Indonesia.⁹ Ketiga, penanganan bencana, ketika terjadi bencana alam di wilayah ASEAN pada tahun 2011, Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dengan mengucurkan dana bantuan sebanyak 3,1 juta dolar Amerika untuk negara-negara yang terkena bencana seperti di Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar dan Filipina, sebagai bentuk solidaritas sesama negara anggota ASEAN.

⁸ M. Syaprin Zahidi, op.cit., hlm. 79

⁹ M. Syaprin Zahidi, op.cit., hlm. 80

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, diplomasi kemanusiaan Indonesia bisa dikatakan meningkat secara pesat. Di tahun 2017, Indonesia menjadi negara anggota ASEAN pertama yang merespon konflik Rohingya dengan dilakukannya dialog oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi bersama State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi. Pada akhirnya, dicapai kesepakatan untuk melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan oleh Indonesia dan ASEAN yang bekerja sama dengan ICRC.¹⁰ Indonesia juga bahkan membentuk suatu lembaga koalisi dengan pihak NGO Indonesia yang dinamakan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Dalam berbagai forum internasional, Indonesia juga selalu menunjukkan perhatiannya terhadap isu-isu kemanusiaan global. Terutama pada konflik Palestina-Israel dan etnis Rohingya, karena memang kedua konflik tersebut telah menjadi sorotan dunia dalam waktu yang cukup lama. Pada permasalahan di Palestina sendiri, ada sejarah yang cukup panjang yang dimiliki pemerintah

Indonesia sejak zaman Bung Karno. Sehingga itu juga menjadi alasan mengapa Indonesia tidak henti-hentinya mendukung rakyat Palestina.

Selain itu, dalam kontribusi di PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak empat kali periode sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Terhitung sejak periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, dan yang terakhir pada periode 2015-2017. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat internasional mempercayai Indonesia atas upaya yang dilakukannya dalam melindungi hak asasi manusia demi menyelesaikan permasalahan kemanusiaan di seluruh dunia. Begitu juga dengan keanggotannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak empat kali. Pada periode 1973-1974, kemudian terpilih lagi pada periode 1995-1996. Lalu untuk ketiga kalinya pada periode 2007-2008, dan pada tahun 2018 Indonesia terpilih lagi untuk periode 2019-2020. Terpilihnya Indonesia dalam DK PBB merupakan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh negara-negara anggota PBB bahwa Indonesia mampu membangun jembatan perdamaian

¹⁰ "Atasi Krisis Rakhine Menlu RI Mengusulkan Formula 4+1", Tabloid Diplomasi No.109 Tahun X, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2017, hlm. 5

dan memajukan perdamaian dunia melalui cara-cara yang diplomatis.¹¹

Meskipun pemerintah Indonesia telah terbilang cukup aktif dalam merespon isu kemanusiaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, namun pemerintah tetap memiliki keterbatasan. Jika diperhatikan, NGO kemanusiaan jauh lebih aktif daripada pemerintah itu sendiri khususnya dalam aksi secara langsung di lokasi bencana. Tentu ada alasan dibalik sulitnya pemerintah dalam menyalurkan bantuan, khususnya bagi pemerintah Indonesia.

Saat ini, Indonesia memang sudah bertransformasi menjadi negara donor, tidak hanya sebagai negara penerima bantuan. Namun keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah adalah adanya peran ganda, sehingga bantuan dari pemerintah Indonesia belum bisa disandingkan dengan negara-negara donor dari Barat. Selain itu, adanya prinsip non-intervensi sebagai norma diplomatik yang diterapkan oleh seluruh negara anggota

ASEAN ternyata juga mempersulit ruang gerak suatu negara untuk menyalurkan bantuan ketika ada krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah Asia Tenggara.

Dalam mengurus dampak dari krisis kemanusiaan, yaitu salah satunya adalah masalah pengungsi, Indonesia juga belum dapat berbuat banyak. Hal tersebut dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga saat ini Indonesia hanya menjadi negara transit bagi para pengungsi yang berdatangan, hingga mereka mendapatkan negara ketiga yaitu negara tujuan mereka. Meskipun Indonesia bukan bagian dari Konvensi Pengungsi 1951, standar perlakuan dan prosedur untuk pengungsi asing berlangsung konsisten. Indonesia telah menganut prinsip *non-refoulement* sejak masa Perang Dingin. Prinsip ini diformalkan oleh Dekrit No. 125/2016 pada “Perlakuan Pengungsi Asing”. Namun demikian, pengungsi dan pencari suaka masih menghadapi banyak batasan dalam mobilitas dan akses kerja.

Kemunculan diplomasi kemanusiaan dan keterbatasan peran pemerintah kemudian ikut menumbuhkan berbagai aktor baru, sehingga tidak hanya dilakukan oleh aktor-aktor seperti negara

¹¹ Rachmat Hidayat, “Empat Kali Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap PBB”, *Tribun News*, diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/09/empat-kali-indonesia-jadi-anggota-tidak-tetap-pbb>, pada 7 Agustus 2018

saja. Selain negara, ternyata ada banyak sekali aktor-aktor lain diluar sana yang dapat melakukan aksi kemanusiaan, mulai dari organisasi internasional, NGO, sektor privat bahkan individu.

ACT adalah salah satu aktor yang hadir dan sangat aktif dalam melakukan diplomasi kemanusiaan. Mereka mampu bergerak bahkan jika dapat dihitung, mungkin bisa sampai sepuluh langkah di depan pemerintah. Contoh nyatanya yaitu, ketika negara-negara di dunia yang dipimpin oleh Indonesia sebagai mediator dalam permasalahan Rohingya, baru bisa menyalurkan bantuan pada akhir tahun 2017. Itu pun hanya boleh melalui koordinasi dari pemerintah Indonesia dan ASEAN yang bekerja sama dengan ICRC. Hal tersebut karena pemerintah Myanmar sendiri ketika itu menolak segala macam bantuan internasional. Sampai disini, bagaimana dengan ACT? Berdasarkan informasi dari pihak ACT, mereka telah memberikan bantuan pada rakyat Rohingya bahkan sejak tahun 2012. Dalam penyaluran bantuannya, ternyata mereka memiliki jalur-jalur khusus yang tidak dimiliki oleh pemerintah Indonesia.¹² Dari

¹² Wawancara bersama Agus Budi Haryadi sebagai Kepala Cabang ACT DIY pada 7 Agustus 2018

situ, diketahui bahwa pemerintah sudah tertinggal cukup jauh dari pergerakan yang dilakukan ACT. Fakta lain yang lebih menarik yang penulis dapat dari pihak ACT sendiri adalah ketika ACT mampu memberikan bantuan sebanyak 1.000 ton beras untuk etnis Rohingya, pemerintah Indonesia baru bisa memberikan sekitar 10 ton beras saja.¹³

Namun, dalam melakukan aksinya ACT juga tidak selalu bergerak sendirian. Selain karena memang ACT disokong oleh masyarakat Indonesia pada khususnya, ACT juga bisa bekerja sama dengan pemerintah. Hubungan ACT dengan pemerintah sendiri dalam keadaan baik, artinya tidak ada perselisihan di antara kedua pihak, bahkan kerja sama pun dibutuhkan demi kelancaran aktivitas keduanya. Hal tersebut membuktikan bahwa ada kekuatan dari *civil society* yang tergabung dalam suatu NGO, bahkan kekuatannya jauh lebih besar dari pemerintah Indonesia sendiri. Kekuatan tersebut juga bukan tidak mungkin dapat memengaruhi pemerintah Indonesia meskipun dalam skala kecil. Sehingga, dalam konteks diplomasi kemanusiaan ternyata keterlibatan NGO seperti ACT

¹³ Ibid.

dapat mendukung dan membantu kerja pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah pun ternyata tidak bisa jika hanya bekerja secara independen, mereka juga masih membutuhkan bantuan. Hal ini ini lah yang kemudian disebut sebagai diplomasi multi jalur.

Peran Strategis ACT Sebagai Aktor Diplomasi Kemanusiaan Indonesia

Kerja pemerintah Indonesia dan ACT sedikit banyak berada pada jalan yang sama, khususnya dalam misi kemanusiaan global. Terlebih, ketika fokus politik luar negeri Indonesia pada tahun 2018 telah ditetapkan pada diplomasi kemanusiaan dan diplomasi perdamaian, yang mana sejalan dengan misi yang selama ini dibawa oleh ACT. Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan bahwa seluruh aktor dapat bersinergi bersama untuk menyelesaikan masalah global. Hal ini selain untuk memperkuat posisi Indonesia dalam dunia internasional, juga untuk mendukung pencapaian kepentingan bersama.¹⁴

¹⁴ "Peran Aktor Non-negara dalam Kebijakan Luar Negeri untuk Mendukung Pencapaian Kepentingan Nasional", Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Peran-Aktor-Non-negara-dalam-Kebijakan-Luar-Negeri-untuk-Mendukung->

Kemunculan ACT sebagai jalur diplomasi baru menunjukkan bahwa dalam menangani isu kemanusiaan secara internasional, aktornya tidak selalu datang dari pemerintah saja. Di Indonesia, peran dan partisipasi aktor non-negara dalam proses hubungan luar negeri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yaitu pada Pasal 1 berbunyi "*hubungan luar negeri selain dilakukan oleh dilakukan pemerintah juga dilakukan oleh aktor non-negara yaitu badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.*"

Dalam melaksanakan diplomasi kemanusiaan, meskipun telah sangat aktif, pemerintah Indonesia ternyata masih banyak terkendala oleh berbagai macam keterbatasan seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

Kerumitan birokrasi ternyata tidak hanya terdapat pada penanganan masalah kemanusiaan di dalam negeri, namun juga yang bertujuan ke luar negeri. Dalam peraturan maupun undang-undang Indonesia sampai saat ini, belum ada yang mengatur mengenai pengiriman bantuan luar negeri dalam bentuk barang, sehingga ketika bantuan tersebut dikirimkan, akan ada biaya yang dikenakan sebagai biaya ekspor.

Pencapaian-Kepentingan-Nasional-R.aspx, pada 18 Agustus 2018

Pada program Kapal Kemanusiaan dengan tujuan ke Somalia dan Rohingya, ACT pertama kalinya mengirimkan bantuan kemanusiaannya dalam bentuk beras. Namun, ternyata pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut dikenai biaya ekspor yang juga di bongkar muat di pelabuhan ekspor. Meskipun nilainya tidak sama dengan transaksi bisnis, tetapi hal tersebut cukup menyulitkan kerja ACT, apalagi yang mereka jalankan adalah bantuan kemanusiaan.¹⁵ ACT kemudian mengeluhkan sikap pemerintah atas kerumitan birokrasi yang terjadi, padahal bantuan kemanusiaan merupakan hal yang sangat membutuhkan respon secepat mungkin.

Pemerintah sendiri memang mengkategorikan beras sebagai industri strategis sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12/M-DAG/PER4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras, sehingga itulah mengapa tarif ekspor diberlakukan dan penerima bantuan kemanusiaan itu disebut sebagai pembeli meski tujuannya adalah bantuan kemanusiaan.¹⁶

¹⁵ Wawancara bersama Agus Budi Haryadi sebagai Kepala Cabang ACT DIY pada 7 Agustus 2018

¹⁶ Sanusi, "ACT Keluhkan Bantuan Kemanusiaan yang Kena Biaya Ekspor dan Rumitnya Birokrasi", *Tribun News*, diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/04/act-keluhkan-bantuan-kemanusiaan-yang-kena-biaya-ekspor-dan-rumitnya-birokrasi>, pada 19 Agustus 2018

Belum adanya regulasi mengenai bantuan kemanusiaan ke luar negeri kemudian menggiring pemerintah terhadap perancangan Peraturan Presiden mengenai Pengelolaan Pemberian Bantuan Internasional. Peraturan tersebut akan menjadi payung hukum yang mengatur mulai dari perumusan kebijakan, mekanisme pengusulan program hingga pembiayaan dan evaluasi bantuan internasional yang akan diberikan oleh Indonesia.¹⁷ Bantuan pun akan lebih difokuskan pada bantuan hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada negara yang membutuhkan.¹⁸

Selain itu, kecepatan pemerintah dan ACT dalam merespon masalah kemanusiaan dapat dikatakan tidak setara, karena seringkali pergerakan ACT jauh lebih dulu di depan pemerintah. Contoh nyatanya yaitu pada isu etnis Rohingya, negara-negara di dunia yang dipimpin oleh Indonesia sebagai mediator pada isu tersebut baru bisa menyalurkan bantuan pada akhir tahun 2017. Bantuan itu pun hanya boleh melalui koordinasi dari

¹⁷ "Indonesia Komitmen Tingkatkan Kontribusi Kerja Sama Selatan Selatan (KSS)", Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses dari [https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesia-Komitmen-Tingkatkan-Kontribusi-Kerja-Sama-Selatan-Selatan-\(KSS\)=.aspx](https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesia-Komitmen-Tingkatkan-Kontribusi-Kerja-Sama-Selatan-Selatan-(KSS)=.aspx), pada 19 Agustus 2018

¹⁸ "Kemlu: Semua Bantuan Internasional Harus lewat Indonesia Aid", *Viva*, Diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/dunia/997873-kemlu-semua-bantuan-internasional-harus-lewat-indonesia-aid>, pada 19 Agustus 2018

pemerintah Indonesia dan ASEAN yang bekerja sama dengan ICRC, karena pihak Myanmar ketika itu menolak segala macam bantuan internasional. Berdasarkan informasi dari pihak ACT, mereka telah menyalurkan bantuannya ke Rohingya sejak tahun 2012. Penyebabnya ternyata adalah adanya jalur khusus yang tidak dimiliki oleh pemerintah Indonesia.¹⁹

Jalur khusus tersebut diciptakan melalui kerja sama yang selama ini dilakukan ACT dengan mitra-mitranya di berbagai negara.²⁰ Tanpa jalur tersebut, program-program ACT selama ini kemungkinan akan lebih sulit untuk diimplementasikan. Meski tidak dijelaskan lebih jauh mengenai jalur khusus tersebut, hal ini mencerminkan peran ACT dalam melakukan diplomasi kemanusiaannya.

Sebagai aktor dari *track two* pada diplomasi multi jalur, dengan kemampuan para petinggi, profesional dan aktivis ACT yang terjun langsung dalam aksi kemanusiaan tanpa adanya ikatan politik apapun - sebagaimana karakteristik NGO menurut Peter Willets - memberikan keleluasaan lebih pada

ACT untuk bergerak secara fleksibel.²¹ Selain itu, dengan adanya respon pemerintah terhadap keluhan ACT terkait dengan pengiriman bantuan kemanusiaan dalam bentuk barang juga menunjukkan bahwa ACT memiliki kredibilitas untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah kemanusiaan. Meskipun tidak secara langsung seperti dengan resolusi konflik, namun apa yang ACT lakukan dengan mendorong pemerintah akan mampu untuk mempercepat proses pemberian bantuan kemanusiaan. Hal tersebut akan berdampak baik pada para korban krisis kemanusiaan yang membutuhkan bantuan.

Sebagai perwakilan dari *civil society*, ACT memercayai bahwa *civil society* mampu menjadi solusi permasalahan global dengan tumbuhnya rasa solidaritas dan partisipasi yang masif.²² ACT sendiri ternyata memiliki kapasitas untuk memengaruhi masyarakat internasional untuk bergerak bersama, yang mana instrumen penting yang digunakan ACT dalam menggerakkan masyarakat terletak pada penggunaan media komunikasi secara aktif.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Diamond dan McDonald bahwa media, baik itu cetak, visual maupun elektronik memiliki tugas untuk memberikan informasi dan melibatkan publik terkait isu-isu kemanusiaan

¹⁹ Wawancara bersama Agus Budi Haryadi sebagai Kepala Cabang ACT DIY pada 7 Agustus 2018

²⁰ Achmad Faizal, "2.000 Ton Beras Bantuan untuk Rohingnya Dikirim dengan Mekanisme Ekspor", Kompas, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2017/09/18/21020041/2.000-ton-beras-bantuan-untuk-rohingnya-dikirim-dengan-mekanisme-ekspor>, pada 19 Agustus 2018

²¹ Ibid.

²² Wawancara bersama Agus Budi Haryadi sebagai Kepala Cabang ACT DIY pada 7 Agustus 2018

agar mereka menjadi lebih *aware* dan *care*. Media sendiri merupakan titik yang sangat kuat untuk menggiring opini publik. Oleh sebab itu, media juga mengambil bagian dalam diplomasi multi jalur sebagai *track nine*.

ACT pada dasarnya bukan merupakan bagian dari media melainkan NGO, sehingga tidak masuk dalam kategori *track nine*. Namun dalam hal ini, ACT menggunakan peran media komunikasi seperti TV, radio, dan juga internet untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian publik, yang mana dampaknya begitu besar bagi pelaksanaan diplomasi kemanusiaan.

Kesadaran dan kepedulian sendiri merupakan hal paling dasar ketika menyangkut kemanusiaan. Terlebih, bagi NGO dan institusi lainnya, membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat dunia merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Richard Sayers dalam bukunya *Principles of Awareness-Raising* menyebutkan bahwa *“to raise awareness of something -good, bad or indifferent- is to promote its visibility and credibility within a community or society. To raise awareness is also to inform and educate people about a topic or issue with the intention of influencing their attitudes,*

behaviours and belief towards the achievement of a defined purpose or goal”.²³

Ketika *civil society* sudah menyadari apa yang sedang terjadi di dunia internasional, dengan adanya kampanye seperti yang selama ini banyak dilakukan ACT kemudian akan memunculkan kepedulian terhadap sesama. Dengan itu *civil society* pun bergerak, seperti melakukan donasi ataupun menggelar aksi solidaritas misalnya, untuk menekan pemerintah dan juga menyadarkan masyarakat. Adanya donasi masyarakat tentu akan membantu mengurangi penderitaan para korban dengan disalurkankannya bantuan.²⁴

Misi ACT untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri dapat dikatakan telah cukup berhasil, dilihat dari statistik para pendonor di laman web ACT yang bertambah setiap harinya.²⁵ Perbandingan bantuan yang diberikan oleh ACT dengan pemerintah pun berada pada angka yang cukup jauh. Seperti ketika ACT mampu menyumbangkan sebanyak 1.000 ton beras pada rakyat Rohingya, pemerintah Indonesia baru bisa

²³ Richard Sayers, *“Principles of Awareness-Raising”*, dalam Rina Amelia dan Mamik Sri Supatmi, *“Media Kampanye Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat (Save The Children) Sebagai Sarana Kekerasan terhadap Anak (Framing Visual dan Kriminologi Konstitutif)”*, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Volume 13 Nomor 2, November 2017, hlm. 92

²⁴ Ibid.

²⁵ Berdasarkan statistik pada laman web resmi ACT

memberikan sekitar 10 ton beras saja.²⁶ Dana ACT yang begitu besar untuk pemberian bantuan membuktikan bahwa kampanye ACT untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia berhasil. Terhitung sejak bulan Agustus 2017 sampai Mei 2018, ACT bahkan telah menyalurkan sekitar 10.000 ton beras ke berbagai negara. Dalam hitungan setiap 3 bulan juga, ACT memberikan bantuan sebanyak 10.000 ton logistik dan 3 juta dolar Amerika.²⁷

Selain itu, keberhasilan ACT dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia ternyata cukup berpengaruh pada kerja pemerintah Indonesia khususnya terlihat dari bagaimana pemerintah mengajak ACT untuk bekerja sama dalam melaksanakan diplomasi kemanusiaan.

Saat ini pemerintah juga sedang mengerjakan Peraturan Presiden mengenai Badan Bantuan Kemanusiaan sejak akhir tahun 2017 yang mana nantinya akan terbentuk *single agency* yang akan dinamakan Indonesian Aid. Badan ini berencana untuk bekerja sama dengan berbagai LSM kemanusiaan di Indonesia, termasuk ACT. Dana Indonesian Aid sendiri telah

²⁶ Wawancara bersama Agus Budi Haryadi sebagai Kepala Cabang ACT DIY pada 7 Agustus 2018

²⁷ Disampaikan oleh Ahyudin, Presiden ACT, dikutip melalui video "Karya Nyata Untuk Krisis Global", <https://www.youtube.com/watch?v=hVjbATNMAPY>, pada 18 Agustus 2018

dialokasikan dalam APBN 2018 sebesar Rp 1 triliun. Dana tersebut bersifat abadi dan tidak menutup kemungkinan jika dana bantuan akan meningkat di masa mendatang, kalau ada sisa pun nantinya akan dialokasikan untuk di tahun berikutnya.²⁸

Pembentukan badan tersebut dilakukan guna menyelaraskan penyaluran bantuan Indonesia ke luar negeri menjadi melalui satu pintu. Langkah ini juga dilakukan guna mempercepat respons dan bantuan pemerintah bagi negara-negara yang membutuhkan, salah satunya dalam menanggapi peristiwa yang perlu tanggapan cepat seperti bencana alam dan krisis kemanusiaan. Nantinya, bantuan kemanusiaan ke luar negeri pun akan melalui satu pintu yaitu Indonesian Aid. Pendirian Indonesian Aid menjadi salah satu langkah strategis dan fokus politik luar negeri Indonesia di 2018.²⁹

Kemudian, transformasi Indonesia sebagai negara donor ternyata belum dapat memberi

²⁸ Riva Dessthanian Suastha, "Perpres Badan Bantuan Internasional RI Ditarget Rampung 2018", CNN Indonesia, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180117202112-106-269719/perpres-badan-bantuan-internasional-ri-ditarget-rampung-2018>, pada 19 Agustus 2018

²⁹ Riva Dessthanian Suastha, "Bentuk Indonesian Aid, RI Rencana Anggarkan Rp 1 Triliun", CNN Indonesia, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180109185239-106-267714/bentuk-indonesian-aid-ri-rencana-anggarkan-rp1-triliun>, pada 13 Agustus 2018

pengaruh besar terhadap peran Indonesia dalam isu kemanusiaan internasional. Seperti pada tahun 2015, Indonesia tidak termasuk dalam daftar penyumbang bantuan untuk Palestina melalui UNRWA.³⁰ Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh adanya peran ganda yang diemban Indonesia. Meskipun Indonesia telah menjadi negara donor, namun Indonesia juga masih menerima donor dari negara lain. Selain itu, jumlah bantuan Indonesia tidak bisa disandingkan dengan negara-negara donor besar khususnya para donor tetap PBB.

Kemunculan ACT ternyata memberi pengaruh cukup besar terhadap status Indonesia sebagai negara pemberi bantuan. Ketika pemerintah terbatas pada anggaran, ACT hadir sebagai gerakan *civil society* dengan donasi yang berasal dari masyarakat. Sehingga, nominal yang dikucurkan ACT untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan internasional terbilang besar dan tidak terbatas.³¹ Semakin banyak dana yang didonasikan oleh masyarakat Indonesia, berarti semakin banyak pula bantuan yang akan diberikan pada negara-negara yang sedang dilanda bencana. Kemampuan ACT dalam mendorong kepedulian masyarakat Indonesia kemudian berpengaruh juga pada

³⁰ "AS Donatur Terbesar untuk Palestina di PBB, Sejauh Mana Sumbangsih Indonesia?", BBC Indonesia, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42622307>, pada 18 Agustus 2018

³¹ Ibid.

respon pemerintah terhadap isu kemanusiaan global.

Pemerintah Indonesia beberapa kali membentuk badan untuk merespon krisis kemanusiaan internasional, diantaranya adalah *Indonesia Cares for Pakistan* dan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). *Indonesia Cares for Pakistan* dibentuk oleh pemerintah dan dikoordinasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk pemberian bantuan bagi korban bencana banjir di Pakistan pada tahun 2010. Sedangkan AKIM dibentuk pada Agustus 2017 untuk menangani masalah etnis Rohingya. ACT sendiri ikut andil dan mendukung kerja kedua badan tersebut. Di *Indonesia Cares for Pakistan*, ACT membantu dalam hal penggalangan donasi juga penyaluran bantuan ke lokasi bencana. Begitu juga dengan AKIM, bersama dengan NGO kemanusiaan lain, ACT juga masuk sebagai anggota aliansi. AKIM sendiri akan dilaksanakan selama 2 tahun dengan berfokus pada empat bidang, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan *humanitarian relief*.³²

Keterlibatan ACT pada dua badan tersebut membuktikan kepercayaan pemerintah

³² Rizki Akbar Hasan, "Menlu RI Resmikan LSM dan Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya", Liputan6, diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/3078175/menlu-ri-resmikan-lsm-dan-bantuan-kemanusiaan-untuk-rohingya>, pada 19 Agustus 2018

Indonesia atas aksi global yang selama ini dilakukan ACT. Sehingga, ketika pemerintah tidak cukup mampu untuk mengeluarkan dana lebih, mereka kemudian bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan seperti ACT untuk menggerakkan masyarakat agar mau berdonasi. Jumlah bantuan yang nantinya disalurkan pun tentu akan semakin banyak. Seperti pada kolaborasi AKIM, telah didapat dana sebesar 2 juta dolar Amerika pada Agustus 2017, yang dikumpulkan melalui donasi masyarakat di masing-masing lembaga anggota AKIM untuk kemudian disalurkan sebagai bantuan bagi rakyat Rohingya.³³

Menurut Viotti dan Kauppi, NGO memiliki kemampuan baik itu untuk memberikan *early warning* dan menopang *political will* pemerintah untuk bertindak. Mereka juga dapat memberikan petunjuk bagi *policymakers* dan mendorong *community building*.³⁴ Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sangat terbantu untuk mencapai politik luar negerinya, yaitu pada diplomasi kemanusiaan. Pemerintah Indonesia menjadi semakin *concern* untuk berpikir secara global terkait isu-isu kemanusiaan saat ini. Aliansi

³³ Yashinta Difa, "Indonesia luncurkan bantuan kemanusiaan 2 juta dolar untuk Rakhine", Antara News, diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/649942/indonesia-luncurkan-bantuan-kemanusiaan-2-juta-dolar-untuk-rakhine>, pada 18 Agustus 2018

³⁴ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, "International Relations and World Politics Fourth Edition", Pearson Education, 2009

yang dibentuk pemerintah Indonesia sendiri mencerminkan bagaimana pemerintah berupaya untuk mempertebal sinerginya dengan berbagai lembaga kemanusiaan. Hal ini berarti *campaign* yang selama ini ACT elukan diberbagai media komunikasi berhasil memengaruhi kebijakan pemerintah. Pemerintah tentu akan merasa malu jika hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa, padahal krisis kemanusiaan sudah terjadi dimana-mana.³⁵ Dua peraturan presiden yang telah disebutkan sendiri saat ini sedang dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan akan rampung serta dapat diimplementasikan di akhir tahun 2018.³⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran media dalam mendukung diplomasi kemanusiaan yang dilakukan ACT memberikan pengaruh yang luar biasa hingga tidak hanya berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat saja, namun juga pada kerja pemerintah Indonesia.

Kesimpulan

ACT muncul sebagai lembaga kemanusiaan lokal yang pada akhirnya

³⁵ Wawancara bersama Agus Budi Haryadi sebagai Kepala Cabang ACT DIY pada 7 Agustus 2018

³⁶ Sudrajat, "Kemenlu Rancang Indonesia Aids untuk Diplomasi Kemanusiaan, Detik News, diakses dari <https://news.detik.com/berita/4135122/kemenlu-rancang-indonesia-aids-untuk-diplomasi-kemanusiaan>, pada 19 Agustus 2018

bertransformasi menjadi lembaga kemanusiaan global karena melihat keadaan dunia yang semakin hari semakin memburuk, baik itu yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Dari bencana alam hingga konflik seperti perang yang pada akhirnya menyebabkan krisis kemanusiaan, khususnya seperti yang terjadi di Suriah, Palestina, Myanmar, Yaman, dan Somalia. Tentu saja, permasalahan ini mengundang perhatian besar masyarakat internasional untuk segera bertindak.

Indonesia sendiri pada dasarnya merupakan salah satu negara yang *concern* pada masalah kemanusiaan global. Sejak kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia menjadi negara yang tidak pernah absen dalam menangani isu kemanusiaan, seperti pada krisis di Palestina. Sebagai aktor tradisional, peran pemerintah Indonesia tidak hanya sebatas melakukan dialog ataupun negosiasi dengan negara yang bermasalah saja, namun juga menyuarakan kepeduliannya melalui berbagai forum internasional untuk menyadarkan dan mengajak negara-negara lain dalam mencari solusi terhadap permasalahan kemanusiaan di dunia.

Walaupun sudah terbilang aktif dalam penanganan masalah kemanusiaan global, ternyata masih ada keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Seperti adanya peran ganda yang diemban Indonesia yaitu

sebagai penerima dan pemberi donor. Lalu, keanggotaan Indonesia di ASEAN yang memiliki prinsip non-intervensi terhadap permasalahan domestik sesama negara anggota. Kemudian, dalam permasalahan pengungsi, Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Selain itu, adanya kerumitan dalam birokrasi dan keterbatasan anggaran pemerintah untuk dialokasikan pada bantuan kemanusiaan global juga membuat pergerakan pemerintah Indonesia tidak fleksibel.

Beberapa keterbatasan pemerintah tersebut kemudian menjadikan ACT sebagai jalur alternatif dan pelengkap dalam menangani isu kemanusiaan global. Melalui keterlibatan para profesional dan aktivis di dalamnya, ACT ternyata mampu berperan sebagaimana peran pemerintah dalam melakukan diplomasi kemanusiaan. ACT bahkan bisa bergerak dengan lebih cepat daripada pemerintah itu sendiri. Seperti pada penyaluran bantuan ke Myanmar, ACT menggunakan jalur khusus yang diperolehnya melalui kemitraan dengan NGO lain. Pergerakan ACT juga tidak dibatasi oleh aturan seperti prinsip non-intervensi ASEAN, sehingga mereka dapat lebih leluasa dalam menyalurkan bantuannya. Kemitraan yang dilakukan ACT bersama NGO lokal dan pemerintah di dunia internasional kemudian mencerminkan bahwa ACT telah melakukan diplomasi kemanusiaan berdasarkan diplomasi

multi jalur *track two*. Selain penyaluran bantuan, ACT juga melakukan berbagai upaya melalui program-programnya untuk meningkatkan jiwa kemanusiaan dan kepedulian masyarakat internasional, seperti melalui aksi solidaritas dan kampanye di media social yang bertujuan untuk menggiring opini masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah para pendonor setiap harinya di laman web ACT.

Berbagai aksi ACT tersebut ternyata pada akhirnya juga mampu memengaruhi dan menginspirasi pemerintah Indonesia untuk bergerak lebih jauh dalam mengangai isu kemanusiaan global. Seperti dengan dibentuknya aliansi kemanusiaan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang mengajak beberapa lembaga kemanusiaan di Indonesia. Kerja sama yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa mereka mengapresiasi karya yang telah dibuat oleh ACT dan juga lembaga kemanusiaan lain sehingga pemerintah merasa perlu untuk melakukan kerja sama. Selain itu, saat ini pemerintah juga sedang dalam proses membuat rancangan peraturan presiden yang nantinya akan mengatur tentang sistem bantuan kemanusiaan ke luar negeri beserta badannya yang

sementara ini dinamakan Indonesian Aid dengan dana yang dialokasikan dari APBN tahun 2018 sebesar 1 triliun rupiah. Rancangan peraturan itu sendiri dibuat karena selama ini Indonesia memang belum memiliki aturan khusus mengenai pemberian bantuan luar negeri dalam bentuk barang. Selama ini juga, ketika ACT memberikan bantuan seperti beras ke negara-negara lain, mereka mengirimkannya dengan menggunakan izin ekspor sehingga ada biaya ekspor yang ACT keluhkan, padahal tujuannya adalah untuk bantuan kemanusiaan.

Indonesia juga banyak mendapat keuntungan dengan kehadiran ACT, seperti ketika pemerintah Indonesia belum mengalokasikan dana khusus bantuan kemanusiaan sehingga berdampak pada keterbatasan dana, ACT pun mengambil peran dalam membantu penggalangan dana. Terlebih, bisa dikatakan bahwa masyarakat jauh lebih percaya pada lembaga seperti ACT daripada pemerintah karena adanya transparansi dana. Hal tersebut kemudian juga akan berpengaruh terhadap membantu keberhasilan politik luar negeri Indonesia khususnya dalam diplomasi kemanusiaan. Terlebih, citra Indonesia akan meningkat di mata internasional.

Referensi

Wawancara

Haryadi, A. B. (2018, Agustus 7). Wawancara Bersama Ketua Cabang Aksi Cepat Tanggap Daerah Istimewa Yogyakarta. (M. F. Gusman, Pewawancara)

Buku dan Jurnal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. (2007). Jakarta.

Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita, Buku X (1988). (2008). Jakarta: Antara Pustaka Utama.

Bakry, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama.* Kencana.

Baswir, R. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia.* Yogyakarta: BPFE.

Budiman, R. P. (2012). Kebijakan Indonesia Terhadap Pengungsi Vietnam di Pulau Galang 1979-1996. *Skripsi.*

Candra, R. (2013). Peran People To People Diplomacy Dalam Hubungan Diplomatik Indonesia-Mesir; Menelisik Fungsi Soft Power dalam Hubungan Kedua Negara (1998-2011). *Tesis*, 22-23.

Concepts and Functions of NGO. (t.thn.). Bangalore, India: Rai Technology University.

Cuthbert, R. (2005). *North Korea: The Potential Application of Multi-Track Diplomacy to Conflict Resolution and Peace Building, Occasional Paper 16.* USA: Institute for Multi-Track Diplomacy.

Gafar, A. (2006). *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hidayat, A. R. (2013). Bantuan Beras ke India Tahun 1946. *Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 1 No.2, Mei*, 79.

Holder, C. (2008). Responding to Humanitarian Crisis. Dalam L. May, *War and Philosophy.* Cambridge University Press.

Joseph Mfutso Bengo, F. M. (2008, Juni). Ethical challenges in conducting research in humanitarian crisis situation. *Malawi Medical Journal* 20(2), 46.

Kim, Y. (2011). The Unveiled Power Of NGOs: How NGOs Influence States' Foreign Policy Behaviors. *Disertasi*, 1.

Krueger, C. (2011). Further Exploration of Track Two by John W. McDonald. *Conflict Research Consortium Article Summary*, 2.

- Mapendere, J. (t.thn.). Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks. *COPOJ – Culture of Peace Online Journal*, 2 (1), 66-81.
- Muhamad, S. V. (2014). DPR dan Isu Palestina: Diplomasi Antarparlemen. *Kajian Vol. 19 No. 1 Maret*, 71.
- Muhamad, S. V. (2017). Peran Asian Parliamentary Assembly Dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel. *Politica Vol. 8, No. 1 Mei*, 59.
- Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM Volume 8 Nomor 2*.
- Sayers, R. (2017). Principles of Awareness-Raising. Dalam R. Amelia, & M. S. Supatmi, *Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 13 Nomor 2* (hal. 92). Depok: Universitas Indonesia.
- Sinulingga, A. A. (2016, Mei). Isu Bencana dan Prinsip-Prinsip Humanitarian Dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional. *Andalas Journal of International Studies*, 5(1), 21.
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2009). *International Relations and World Politics Fourth Edition*. New Jersey: Pearson Education.
- Yusdiyanto. (2012, Mei-Agustus). Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undang-Undang Keormasan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2, 3*.
- Zahidi, M. S. (2015, April). Double Standard Indonesia dalam Diplomasi Kemanusiaan. *Insignia Journal of Internasional Relations Vol.2 No.1*, 76-90.

Website

- Indonesia to Host Tsunami Summit*. (2005, Januari 1). Dipetik Agustus 7, 2018, dari The Age: <https://www.theage.com.au/world/asia/indonesia-to-host-tsunami-summit-20050101-gdzacg.html>
- RI masuk Dewan HAM PBB lagi*. (2011, Mei 21). Dipetik Juli 12, 2018, dari BBC: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/05/110521_indonesiaham
- What are Humanitarian Principles*. (2012, Juni). Dipetik Juli 13, 2018, dari UNOCHA: https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
- PBB Serukan Bantuan Lebih bagi Krisis Kemanusiaan*. (2014, Januari 3). Dipetik Juli 15, 2018, dari Deutsche Welle: <https://www.dw.com/id/pbb-serukan-bantuan-lebih-bagi-krisis-kemanusiaan/a-17339707>
- Peran Aktor Non-negara dalam Kebijakan Luar Negeri untuk Mendukung Pencapaian Kepentingan Nasional RI*. (2014, Mei 23). Dipetik Agustus 13, 2018, dari Kementerian Luar Negeri Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Peran-Aktor-Non-negara-dalam-Kebijakan-Luar-Negeri-untuk-Mendukung-Pencapaian-Kepentingan-Nasional-R.aspx>

- Hari Kemanusiaan Sedunia, Mensos Khofifah: Indonesia Aktif Berikan Bantuan ke Negara Lain.* (2017, Agustus 22). Dipetik Juli 11, 2018, dari Okezone: <https://news.okezone.com/read/2017/08/22/337/1760716/hari-kemanusiaan-sedunia-mensos-khofifah-indonesia-aktif-berikan-bantuan-ke-negara-lain>
- Indonesia Dituntut Tingkatkan Komitmen dalam Diplomasi Kemanusiaan.* (2017, Juni 15). Dipetik Juli 17, 2018, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Dituntut-Tingkatkan-Komitmen-dalam-Diplomasi-Kemanusiaan.aspx>
- Komitmen Bantu Myanmar, Menlu Luncurkan Program Bantuan Kemanusiaan.* (2017, Agustus 31). Dipetik Agustus 13, 2018, dari Kementerian Luar Negeri Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Komitmen-Bantu-Myanmar,-Menlu-Luncurkan-Program-Bantuan-Kemanusiaan.aspx>
- Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Kedepankan Sinergi Seluruh Elemen Pemerintah dan Masyarakat.* (2018, Februari 10). Dipetik Maret 12, 2018, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Diplomasi-Kemanusiaan-Indonesia-Kedepankan-Sinergi-Seluruh-Element-Pemerintah-dan-Masyarakat-.aspx>
- Kementerian Luar Negeri Harus Lanjutkan Kontribusi RI untuk Perdamaian dan Kemanusiaan Dunia.* (2018, Februari 12). Dipetik Juli 14, 2018, dari PresidenRI.go.id: <http://presidenri.go.id/berita-aktual/kementerian-luar-negeri-harus-lanjutkan-kontribusi-ri-untuk-perdamaian-dan-kemanusiaan-dunia.html>
- Misi Kemanusiaan, Persahabatan, dan Kerja Sama Ekonomi ke Negara Asia Selatan.* (2018, Januari 31). Dipetik Agustus 6, 2018, dari PresidenRI.go.id: <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/misi-kemanusiaan-persahabatan-dan-kerja-sama-ekonomi-ke-negara-asia-selatan.html>
- Ten Humanitarian Crises to Look Out for in 2018.* (2018, Januari 1). Dipetik Agustus 15, 2018, dari Irin: <http://www.irinnews.org/feature/2018/01/01/ten-humanitarian-crises-look-out-2018>
- Yemen could be 'worst' humanitarian crisis in 50 years.* (2018, Januari 6). Dipetik Juli 16, 2018, dari Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2018/01/yemen-worst-humanitarian-crisis-50-years-180105190332474.html>
- Akbar, N. (2017, April 11). *Apresiasi Aksi Kemanusiaan ke Afrika, Ini Pesan Wapres Ke Tim ACT.* Dipetik Maret 12, 2018, dari JPP: <https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/304912-apresiasi-aksi-kemanusiaan-ke-afrika-ini-pesan-wapres-ke-tim-act>

- Ardianto, R. (2016, Juli 3). *Jadikan Indonesia Negara Donor*. Dipetik Juli 11, 2018, dari Koran Sindo: <http://koran-sindo.com/page/news/2016-07-03/0/10>
- Ariefyanto, M. I. (2012, Oktober 24). *PBB Kumpulkan LSM di Rohingya*. Dipetik Maret 19, 2018, dari Republika: <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asean/12/10/24/mcdj0b-pbb-kumpulkan-lsm-di-rohingnya>
- Asmardika, R. (2018, Januari 9). *8 Fokus Politik Luar Negeri Indonesia di 2018*. Dipetik Maret 12, 2018, dari Okezone News: <https://news.okezone.com/read/2018/01/09/18/1842551/8-fokus-politik-luar-negeri-indonesia-di-2018?page=2>
- Cengiz, S. (2017, Maret 10). *Humanitarian diplomacy strongest weapon against global challenges*. Dipetik Juli 12, 2018, dari Arab News: <http://www.arabnews.com/node/1066516>
- Ferris, E. (2014, Juli 30). *Too Many Humanitarian Crises, Not Enough Global Resources*. Dipetik Juli 13, 2018, dari Brookings: <https://www.brookings.edu/opinions/too-many-humanitarian-crises-not-enough-global-resources/>
- Harty, I., & Arvirianty, A. (2017, Desember 7). *Kedepankan Diplomasi Kemanusiaan dan Perdamaian*. Dipetik Agustus 6, 2018, dari Media Indonesia: <http://mediaindonesia.com/read/detail/135457-kedepankan-diplomasi-kemanusiaan-dan-perdamaian>
- Hidayat, R. (2018, Juni 9). *Empat Kali Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap PBB*. Dipetik Agustus 7, 2018, dari Tribun News: <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/09/empat-kali-indonesia-jadi-anggota-tidak-tetap-pbb>
- Humanitarian Diplomacy Policy*. (t.thn.). Dipetik Juli 13, 2018, dari International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: <http://www.ifrc.org/en/what-we-do/humanitarian-diplomacy/humanitarian-diplomacy-policy/>
- Humas. (2014, Oktober 22). *Indonesia Kembali Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM di PBB*. Dipetik Juli 12, 2018, dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <http://setkab.go.id/indonesia-kembali-terpilih-jadi-anggota-dewan-ham-di-pbb/>
- Malau, S. (2017, November 13). *Guru Besar UI Apresiasi 3 Langkah Konkret ASEAN Atasi Krisis Kemanusiaan di Myanmar*. Dipetik Agustus 6, 2018, dari Tribun News: <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/13/guru-besar-ui-apresiasi-3-langkah-konkret-asean-atasi-krisis-kemanusiaan-di-myanmar>.

- Maulana, V. (2014, Juni 5). *Tak Cuma Menerima, Indonesia Kini Jadi Negara Donor*. Dipetik Juli 11, 2018, dari Sindo News: <https://international.sindonews.com/read/870497/40/tak-cuma-menerima-indonesia-kini-jadi-negara-donor-1401958925>
- Muftisany, H. (2013, Agustus 21). *ACT Gandeng KBRI Mesir Salurkan Bantuan*. Dipetik Maret 15, 2018, dari Republika: <http://republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/08/21/mrUY5u-act-gandeng-kbri-mesir-salurkankan-bantuan>
- O'Hagan, J. (2017, Januari 25). *The Challenge of Humanitarian Diplomacy*. Dipetik Juli 12, 2018, dari Australian Institute of International Affairs: <http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-challenge-of-humanitarian-diplomacy/>
- Putra, E. P. (2016, Juni 9). *Perjalanan 'Kontrak Mati' Soeharto Membantu Muslim Bosnia*. Dipetik Agustus 5, 2018, dari Republika: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/09/o8gcya334-perjalanan-kontrak-mati-soeharto-membantu-muslim-bosnia-part4>
- Rachman, S. (2014, Januari 3). *ACT Fokus Tingkatkan Aksi Kemanusiaan Dunia*. Dipetik Maret 19, 2018, dari Republika: <http://video.republika.co.id/berita/video/berita/14/01/03/myt28f-2014-act-fokus-tingkatkan-aksi-kemanusiaan-dunia>
- Rahmani, M. A. (2018, Maret 9). *Presiden ACT: Membantu Warga Ghouta adalah Amanah Langit*. Dipetik Maret 18, 2018, dari ACT: <https://act.id/news/detail/presiden-act-membantu-warga-ghouta-adalah-amanah-langit>
- Rimadi, L. (2017, Desember 8). *Sukarno, Cerita Anti-Israel dan Perjuangan Kemerdekaan Palestina*. Dipetik Agustus 6, 2018, dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/news/read/3189190/sukarno-cerita-anti-israel-dan-perjuangan-kemerdekaan-palestina>
- Srikandini, A. G. (2012). *Isu Kemanusiaan dalam Hubungan Internasional*. Dipetik Juli 5, 2018, dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional: <http://hi.fisipol.ugm.ac.id/issue-brief/isu-kemanusiaan-dalam-hubungan-internasional/>
- Suastha, R. D. (2018, Januari 9). *Bentuk Indonesian Aid, RI Rencana Anggarkan Rp1 Triliun*. Dipetik Agustus 13, 2018, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180109185239-106-267714/bentuk-indonesian-aid-ri-rencana-anggarkan-rp1-triliun>

- Sulistiowati, D. (2018, April 6). *Bangun Sinergi Bersama Kemenlu RI Perkuat Diplomasi Kemanusiaan*. Dipetik Agustus 13, 2018, dari ACT: <https://act.id/news/detail/bangun-sinergi-bersama-kemenlu-ri-perkuat-diplomasi-kemanusiaan>
- Tracks of Diplomacy*. (t.thn.). Dipetik Maret 26, 2018, dari United States Institute of Peace: <https://www.usip.org/glossary/tracks-diplomacy>
- What is a Humanitarian Emergency?* (t.thn.). Dipetik Juni 22, 2018, dari Humanitarian Coalition: <https://www.humanitariancoalition.ca/what-is-a-humanitarian-emergency>
- Wijayati, H. (2018, Januari 13). *Multitrack Diplomacy: Konsep dan 9 Track Multitrack Diplomacy*. Dipetik April 22, 2018, dari Portal-Ilmu.com: <https://portal-ilmu.com/konsep-multitrack-diplomacy/>